

# FORESTS & FINANCE

## NEWSLETTER

Edisi Ketiga, Juli 2017



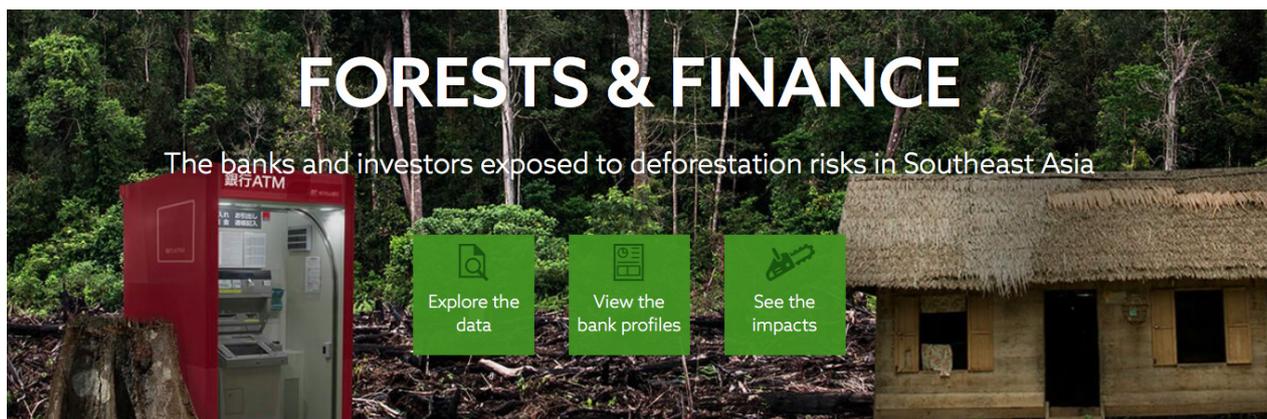
## Rekan-rekan yang terhormat,

Tanggal 7 dan 8 Juli, kepala negara dari negara-negara G20 akan melakukan pertemuan antar kepala negara di Hamburg. Ini adalah pertemuan penting untuk negara-negara G20 untuk mengambil langkah tegas menuju arsitektur keuangan dunia yang lebih berkelanjutan. Dalam newsletter ini anda dapat membaca beberapa rekomendasi kami untuk Presiden Jokowi, dan tentang rekomendasi-rekomendasi yang lebih komprehensif dari C20, imbuhan dari G20 dari masyarakat sipil.

Di bulan Juni kami juga memperbaharui Forest and Finance database dengan data terkini, yang menunjukkan bahwa pembiayaan untuk negara yang berisiko di sektor kehutanan terus tumbuh. Disamping itu, masyarakat meminta bank-bank untuk menghentikan pembiayaan ke perusahaan-perusahaan yang merampas tanah dan menghancurkan habitat alami mereka.

Penyandang dana terbesar dari komoditas-komoditas sector kehutanan masih belum menerapkan berbagai kebijakan dan proses yang solid untuk mengurangi berbagai risiko merugikan yang berhubungan dengan pembiayaan dari komoditas-komoditas sektor kehutanan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran, dan konflik masyarakat.

**Salam lestari**



## Database Forests and Finance telah diperbaharui

Database forestsandfinance.org telah diperbarui dengan informasi mengenai aliran uang ke perusahaan-perusahaan di kawasan Asia Tenggara yang berisiko melakukan kerusakan hutan sejak tahun 2010. Data terbaru mengungkapkan besarnya peran bank dan investor dari Jepang dan Malaysia dalam membiayai perusahaan-perusahaan yang operasinya memberikan dampak kepada hutan tropis alam dan masyarakat sekitar yang bergantung pada hutan tersebut.

Semenjak menerbitkan database awal, September 2016, beberapa perubahan telah dilakukan, terutama dalam hal metodologi dan pemilihan perusahaan yang digunakan sebagai acuan. Database saat ini memasukan lebih dari 180 perusahaan dan berdasarkan metodologi yang lebih komprehensif. Metodologi baru ini mencakup tidak hanya uang yang disediakan untuk aktivitas pengolahan utama dan produksi dari perusahaan-perusahaan yang berisiko pada hutan, namun juga aktivitas-aktivitas rantai pasok hilir dan tengah (midstream), termasuk aktivitas perdagangan dan pabrian.

[Selengkapnya](#)

# Pertemuan G20 dan Keuangan Berkelanjutan: Apa yang Perlu Disampaikan Presiden Jokowi di Hamburg?

Oleh: Rahmawati Retno Winarni & Jalal

Pertemuan pimpinan keuangan negara-negara G20 telah berakhir di pada Sabtu 18 Maret 2017. Hasilnya 'mengejutkan' seluruh pihak karena benar-benar menunjukkan bahwa proteksionisme Amerika Serikat memang bisa mengubah banyak kesepakatan yang sudah dicapai bertahun-tahun. Steven Mnuchin, Menteri Keuangan Amerika Serikat, secara terang-terangan menyatakan bahwa pendekatan G20 yang selama ini menentang proteksionisme telah menjadi "not really relevant."

Perwakilan Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa sudah menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas sulitnya mempertahankan perdagangan bebas, saling menguntungkan dan lebih adil di antara negara-negara G20. Mereka semua telah berupaya keras untuk mencapai kesepakatan dengan mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat tanpa mencederai tujuan dan pendekatan yang selama ini dipercaya sebagai yang terbaik. Tetapi sikap non-kompromistik perwakilan Amerika Serikat membuat kesepakatan tak bisa dicapai.

Selain proteksionisme, Amerika Serikat juga benar-benar menunjukkan perlawanan terhadap ilmu pengetahuan dalam bentuk penentangan terhadap upaya pengendalian perubahan iklim. Kalau di dalam negeri sendiri Amerika Serikat memotong 31% anggaran perlindungan lingkungan dan mulai menghidupkan kembali industri batubara dan mendorong pertumbuhan industri minyak secara besar-besaran, dalam pertemuan G20 Amerika Serikat bersama-sama dengan Arab Saudi bahkan mengutuk sekadar referensi terhadap pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim di dalam teks perjanjian.

Ketidaksetujuan kedua negara kemudian benar-benar menghilangkan referensi itu, lantaran teks perjanjian haruslah hanya yang disetujui oleh seluruh pihak. Dengan Donald Trump sebagai presiden yang secara terbuka menyatakan bahwa perubahan iklim adalah hoax buatan Tiongkok untuk merugikan ekonomi Amerika Serikat, dan pembiayaan untuk menanganinya adalah pemborosan belaka, menjadi mustahil bagi Amerika Serikat untuk berpartisipasi di dalam pengendaliannya.

Dengan hilangnya pernyataan tentang perdagangan bebas, saling menguntungkan dan adil, serta pernyataan tentang pendanaan untuk penanganan perubahan iklim, maka pertemuan tersebut dinyatakan gagal oleh banyak pihak. Untungnya, kesepakatan

mengenai stabilisasi nilai tukar dan penghentian kompetisi devaluasi mata uang bisa masuk ke dalam perjanjian. Tetapi, dengan kegagalan di dua isu kunci tersebut, seluruh negara—selain Amerika Serikat, dan Arab Saudi, tentu saja—berharap perbaikan luar biasa bisa terjadi pada pertemuan kepala negara G20 di Hamburg.

Oleh karena itu, kehadiran Presiden Jokowi di Hamburg pada bulan Juli mendatang perlu dipersiapkan dengan baik. Pesan-pesan Presiden Jokowi perlu menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan dua isu tadi ke dalam teks perjanjian yang disepakati para kepala negara. Sementara, di sisi lain, Indonesia juga perlu mendapatkan keuntungan jangka panjang dari pertemuan tersebut. Bukan saja dari perdagangan, namun juga dari investasi dan pendanaan untuk kepentingan rehabilitasi/restorasi lingkungan Indonesia yang juga menguntungkan bagi dunia. Beberapa pesan yang perlu disampaikan adalah:

Pertama, menunjukkan keuntungan-keuntungan model perdagangan yang selama ini diperjuangkan oleh G20. Perdagangan bebas, saling menguntungkan dan adil adalah apa yang dinyatakan sebagai salah satu *raison d'être* dibentuknya G20. Kemajuan perekonomian telah dicapai melalui model tersebut, dan hal ini perlu disokong oleh bukti-bukti nyata berupa statistik perdagangan dan lainnya. Selama ini Presiden Trump 'terkenal' dengan kesalahan-kesalahan data yang sangat elementer. Tanpa harus menyatakan kesalahan dalam apa yang dipercaya oleh Trump, penekanan terhadap kemajuan bersama perlu disampaikan secara gamblang.

Kedua, memberikan gambaran komprehensif mengenai kemungkinan dampak proteksionisme terhadap ekonomi Amerika Serikat. Proteksionisme memiliki daya tarik jangka pendek, yang mungkin saja merupakan satu-satunya hal yang dihitung oleh Trump. Namun, dunia memiliki sejumlah besar contoh bahwa dalam jangka panjang proteksionisme tidaklah menguntungkan. Kerugian dalam jangka panjang, yang akan dirasakan oleh rakyat Amerika Serikat jauh setelah Donald Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden perlu disampaikan, agar menjadi bahan pertimbangan tim ekonomi Trump yang dipastikan akan hadir di Hamburg.

Ketiga, menekankan tentang penting dan urgennya penanganan perubahan iklim bagi seluruh dunia.

Sejumlah 97% ilmuwan mumpuni dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan terkait iklim telah sepakat bahwa perubahan iklim itu terjadi, penyebabnya adalah antropogenik, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan segera, serta dunia akan mengalami dampak yang semakin buruk bila penanganannya diperlambat. Amerika Serikat, sebagai negara penghasil emisi nomor dua tertinggi di dunia setelah Tiongkok, tidak bisa mengabaikan hal ini, lantaran rakyatnya sendiri yang akan menderita, selain juga akan membahayakan negara-negara lain. Dampak terhadap Amerika Serikat sendiri perlu menjadi penekanan.

Keempat, memberikan gambaran mengenai keuntungan ekonomi-sosial-lingkungan yang telah dan bisa diperoleh bagi negara-negara yang telah mulai menjalankan new climate economy. Menangani perubahan iklim dengan sungguh-sungguh bukan sekadar membawa konsekuensi biaya, melainkan juga membawa keuntungan ekonomi. Seluruh ekonom lingkungan sepakat bahwa semakin awal perubahan iklim ditangani, maka biayanya semakin kecil; selain keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi itu semakin besar. Contoh-contohnya bisa ditemukan di banyak negara G20, namun terutama bisa ditunjukkan contoh sukses dari kota dan negara bagian Amerika Serikat sendiri yang banyak di antaranya sudah menerapkan ekonomi yang kompatibel dengan tujuan pengelolaan perubahan iklim.

Kelima, menyatakan dukungan kepada investasi untuk pencapaian SDGs. Bukan saja terkait dengan perubahan iklim, seharusnya seluruh investasi pemerintah dan swasta diarahkan kepada pembiayaan yang sesuai dengan pencapaian SDGs di tahun 2030. Inilah yang dinyatakan sebagai pengertian keuangan berkelanjutan (sustainable financing) yang mutakhir. Amerika Serikat sendiri masih memiliki kesenjangan yang tinggi dalam banyak Tujuan SDGs, sehingga perlu untuk mengarahkan pembiayaan publik yang bisa menutup kesejangan itu. Seluruh negara lain juga demikian. Presiden Jokowi juga bisa menekankan bahwa SDG17 menekankan pada kerjasama intra dan antarnegara dalam pencapaiannya, sehingga investasi dalam pencapaian SDGs juga perlu dilakukan di negara-negara berkembang yang lebih membutuhkan.

Keenam, menyatakan dukungan terhadap GreenInvest Platform di bawah kepemimpinan Jerman. Pada Januari 2017 telah disepakati bahwa salah satu program penting G20 di bawah kepemimpinan Jerman adalah menjalankan GreenInvest Platform, bukan hanya untuk negara-negara G20, melainkan juga untuk negara-negara berkembang yang membutuhkannya. Dalam perhitungan GreenInvest Platform, untuk membuat dunia benar-benar bisa masuk ke dalam ekonomi hijau—rendah karbon, memiliki resiliensi atas perubahan iklim, tidak menghasilkan polusi—dibutuhkan USD90 triliun, yang sebagian besarnya diinvestasikan di negara-negara berkembang. Presiden Jokowi perlu menyatakan dukungan terhadap platform ini untuk menunjukkan pemihakan kepada ekonomi hijau dan negara-

negara berkembang. Selain, tentu saja, hal ini akan menguntungkan Indonesia sendiri.

Ketujuh, mendesak diberlakukannya safeguards sosial dan lingkungan bagi investasi yang dilaksanakan oleh dan di negara-negara G20. Kebanyakan lembaga keuangan dari negara-negara G20 telah memiliki kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan di dalam investasi mereka. Namun, seluruhnya bersifat voluntari dan/atau terbatas keberlakuannya. Kiranya pendekatan voluntari tersebut sudah tidak lagi memadai, mengingat berbagai permasalahan sosial dan lingkungan terkait dengan investasi sudah semakin mengemuka, dan banyak di antaranya yang malah membuat negara-negara sasaran investasi menjadi dirugikan, sementara keuntungan ekonomi tetap diperoleh negara asal investasi. Pemberlakuan safeguards sosial dan lingkungan di seluruh negara-negara G20, yang merupakan negara asal sekaligus sasaran investasi yang utama akan menguntungkan negara-negara G20 sendiri lantaran menjamin dampak bersih positif dari investasi, baik bagi negara asal maupun sasaran.

Terakhir, mengundang berbagai investasi berkelanjutan untuk masuk ke Indonesia. Indonesia adalah negara tujuan investasi yang sangat menarik untuk berbagai sektor ekonomi. Apalagi, peringkat ease of doing business di Indonesia terus meningkat. Presiden Jokowi perlu menekankan pada sektor-sektor ekonomi yang memang bisa menarik minat investasi asing, namun dengan menegaskan bahwa investasi yang diinginkan Indonesia adalah investasi yang memerhatikan keberlanjutan dengan dimensi ekonomi-sosial-lingkungan yang kokoh. Indonesia sudah banyak menderita karena investasi domestik maupun asing yang secara ekonomi bisa mendatangkan keuntungan bagi investor namun keuntungan ekonomi bagi Indonesia sendiri jauh lebih kecil; sementara dampak negatif sosial dan lingkungannya ditanggung oleh Indonesia. Hal ini perlu diakhiri, dengan hanya menerima investasi berkelanjutan.

Agar pesan-pesan tersebut bisa dianggap serius oleh negara-negara G20 lainnya, Indonesia perlu menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunannya memang mengarah ke sana. Di antara yang terpenting adalah memastikan bahwa Indonesia memiliki regulasi tentang keuangan berkelanjutan. Hingga sekarang, bentuk yang dimiliki barulah soft regulation berupa peta jalan yang sudah dibuat Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diluncurkan pada Desember 2014. Ada baiknya, sebelum ke Hamburg Presiden Jokowi memastikan terlebih dahulu bahwa peta jalan tersebut telah diresmikan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Ini sungguh penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia.

*Rahmawati Retno Winarni*  
*Direktur Eksekutif TuK INDONESIA*

*Jalal*  
*Sustainability Specialist TuK INDONESIA*

# Masyarakat Sipil Mengawal Pertemuan G20 Keuangan Berkelanjutan untuk Kemaslahatan Masyarakat dan Lingkungan (1)

Oleh: Jalal

Salah satu pelesetan yang paling saya sukai adalah nama C20, yang bisa membuat orang yang biasa membaca tentang G20 kecele. Ia merupakan kependekan Civil-20, yang maksudnya adalah kumpulan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari negara-negara G20. Jadi, ini jelas pelesetan yang ekstra-cerdas. Namun, kecerdasannya bukan cuma di soal nama. Saya melihat organisasi ini memiliki pemikiran mendalam dalam mengawal agenda-agenda G20, tentu dari sudut pandang kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Tanggal 15 Maret 2017 lalu mereka mengeluarkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk G20. Yang langsung membetot perhatian saya adalah yang mereka beri judul Reform the International Financial System. Mengapa? Karena rekomendasi kebijakan ini benar-benar menjawab kekhawatiran banyak pihak setelah pertemuan menteri-menteri keuangan G20 yang lalu dipandang gagal. Tentu, kita masih ingat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya Arab Saudi adalah biang kerok dari kegagalan itu. Tapi, apa yang terjadi itu langsung dibalas dengan saran-saran yang kuat.

Paragraf pembuka rekomendasi kebijakan itu sungguh menohok. "The global financial system is neither resilient nor sustainable. Significant risks and regulatory gaps remain so that citizens are vulnerable to new financial crises, abusive practices such as tax dodging, and new technological challenges. The financial sector must serve the needs of the people and the planet but the G20 still promotes a financial system and monetary policies that create financial instability, social and environmental havoc, inequality, excessive debt and climate change." Saya sudah lama tidak membaca gugatan sekuat itu.

Sangatlah benar bahwa walaupun banyak pemerintah telah mengupayakan perubahan dalam sistem keuangan, namun hasilnya belumlah memuaskan. Kerentanan dan ketidakberlanjutan masih menjadi ciri-ciri dari sistem keuangan di dunia ini. Ambil contoh Amerika Serikat sendiri, yang merupakan negara asal berbagai krisis keuangan global. Alih-alih sistem keuangannya membaik dengan melindungi seluruh masyarakat (Main Street), setelah krisis pemerintahnya malahan lebih membuat para elit keuangan (Wall Street) menjadi lebih perkasa.

Sektor keuangan seharusnya menopang hidup masyarakat dan Bumi, agar keberlanjutan bisa dipastikan. Namun yang terjadi adalah pemerintahan negara-negara G20 mempromosikan sistem dan kebijakan yang membuat kondisi keuangan semakin tidak stabil, kerusakan sosial dan lingkungan, ketimpangan dan hutang yang terus memburuk, juga iklim yang terus berubah. Kalau mengambil Amerika Serikat sebagai contoh lagi, jelas sekali pemerintahnya juga sedang membuat tindakan-tindakan yang merugikan pengendalian perubahan iklim, termasuk dengan mengabaikan perlunya pengarahannya sektor keuangan untuk keperluan tersebut. Jadi, peringatan C20 sangatlah tepat.

Rekomendasi kebijakan keuangan yang dikeluarkan C20 sendiri terdiri dari empat bagian, yaitu regulasi dan arsitektur keuangan; hutang; keuangan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan; serta pajak, anti-pencucian uang, dan korupsi. Yang saya ingin bahas lebih lanjut adalah rekomendasi ketiga, yaitu keuangan berkelanjutan.

Bagian awal rekomendasi tentang keuangan berkelanjutan menyatakan bahwa "The health and productive capacity of people and planet are essential for a sustainable economy. Action and regulations must align financial systems with the 2030 Agenda in order to strengthen these, deliver the SDGs and the climate commitments, and add at least US\$12trn a year to global GDP."

Pemahaman yang jelas hendak disampaikan di situ adalah bahwa masyarakat dan lingkungan yang sehat dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi produktif tidaklah bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana nasib umat manusia serta bumi—apakah akan bisa berkelanjutan atau mengalami kehancuran—memang digantungkan pada dua kondisi itu. Karena masyarakat global telah menyepakati bahwa agenda keberlanjutan adalah sebagaimana yang telah diformulasikan ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs), maka sistem keuangan memang harus diarahkan ke sana. Sistem keuangan yang benar adalah yang membuat tercapainya SDGs dan komitmen pengelolaan perubahan iklim, sebagaimana yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Paris.

Sampai di sini saya hendak menyampaikan hasil pengamatan soal apa yang saya saksikan mulai 2015 hingga sekarang dalam dunia keuangan berkelanjutan. Kalau pada periode sebelumnya tidaklah terlampau tegas apa yang dimaksudkan dengan berkelanjutan pada frasa tersebut, kini tampaknya seluruh pemangku kepentingan telah menyepakati bahwa keuangan berkelanjutan memang berarti dukungan sepenuhnya sektor finansial untuk pencapaian SDGs serta Kesepakatan Paris. Hal ini menjadikan keuangan berkelanjutan jauh lebih operasional. Di satu sisi, sektor finansial perlu mengarahkan pembiayaan yang mengarahkan pencapaiannya, di sisi yang lain sektor finansial perlu menghindari pembiayaan yang melawan kepentingan tersebut. Sekali lagi, jauh lebih tegas!

Terdapat empat rekomendasi yang diberikan oleh C20. Yang pertama, “Make sustainable finance a core focus of the G20 finance track, including by upgrading the study group on green finance (GFSG) to a permanent working group, and drawing on the full range of experience by civil society worldwide.” Tentu saja, lantaran keuangan berkelanjutan masih jauh dari kebijakan dan praktik keuangan di negara-negara G20, maka tuntutan untuk menjadikannya fokus adalah yang terpenting. Oleh karenanya juga, status study group untuk keuangan hijau (sinonim untuk keuangan berkelanjutan) harus dinaikkan menjadi permanent working group. Yang juga sangat menarik adalah pernyataan di ujung rekomendasi untuk memastikan bahwa kelompok kerja tersebut perlu untuk belajar dari pengalaman masyarakat sipil di seluruh dunia. Masyarakat sipil memang adalah pendorong utama keuangan berkelanjutan.

Rekomendasi kedua, “Require mandatory disclosure on sustainability risks and opportunities for both private and public actors.” Jelas hal ini disandarkan pada praktik terbaik yang sudah dikenal. Ada banyak bukti bahwa laporan keberlanjutan—yang memuat risiko dan peluang yang timbul dari inisiatif-inisiatif keberlanjutan—bukan sekadar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melainkan juga meningkatkan kinerja keberlanjutan sendiri. Mengapa? Karena organisasi-organisasi yang melaporkan kinerjanya kemudian bisa membandingkan dan diperbandingkan satu sama lain. Hal tersebut berlaku untuk pengungkapan yang sukarela maupun wajib. Namun, dengan kondisi keuangan global seperti sekarang, banyak pakar yang mendorong hal ini menjadi kewajiban. Berdasarkan pengalaman berbagai negara, kewajiban pengungkapan memang terbukti menjadi cara yang baik, kalau bukan malah yang terbaik, untuk mendorong, memfasilitasi, dan memaksa perusahaan dan pemerintah untuk menaikkan kinerja keberlanjutannya.

“Ensure compatibility with the 2030 Agenda and the Paris Agreement by developing regulation and accountability measures for financing and investments” merupakan rekomendasi ketiga. Sekali lagi, hal ini sesuai dengan

perkembangan sejak 2015. Tidaklah masuk akal bagi dunia untuk memiliki agenda keberlanjutan—termasuk pengelolaan perubahan iklim—yang disepakati bersama namun membiarkan sektor keuangan dan investasi untuk berjalan sendiri atau bahkan melawannya. Penting untuk disadari bahwa ada banyak sektor ekonomi yang apabila dibiayai dengan lebih baik maka keberlanjutan bisa dicapai lebih cepat—bahkan lebih cepat daripada 2030—namun ada juga sektor-sektor yang secara diametrisal bertentangan dengan tujuan keberlanjutan. Maka, dibutuhkan regulasi dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa dunia memang mengarahkan sumberdaya finansialnya untuk keberlanjutan, bukan membiayai penghancuran diri.

Yang terakhir, “Price in environmental externalities by committing, each country in its own way, to a strong effective carbon price by 2020.” Udah sejak lama diketahui bahwa apabila sistem ekonomi membiarkan berbagai eksternalitas, maka perusahaan-perusahaan akan terus melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan sosial. Salah satu kegagalan pasar terbesar dalam sejarah modern adalah membiarkan emisi gas rumah kaca tidak terkontrol sehingga umat manusia kemudian berhadapan dengan bahaya terbesar yang pernah dihadapi: perubahan iklim. Karenanya, memastikan bahwa emisi (setara) karbon harus diinternalisasikan ke dalam biaya adalah cara yang harus ditempuh. Dan umat manusia tak punya waktu yang lama lagi. Banyak pakar yang menyatakan—sebagaimana yang kemudian menjadi dasar rekomendasi C20—bahwa 2020 adalah waktu di mana dunia memang harus memiliki kesepakatan atas harga yang harus dibayarkan bagi setiap ton karbon yang diemisikan. Atau, generasi mendatang umat manusia tak akan punya lagi kesempatan hidup dalam kondisi yang baik.

Demikianlah. Empat rekomendasi yang sangat bernas dari C20: menjadikan keuangan berkelanjutan menjadi fokus G20, mewajibkan pelaporan keberlanjutan, memastikan kompatibilitas sektor keuangan dan investasi dengan SDGs dan Kesepakatan Paris, serta menerapkan pajak karbon selambatnya pada tahun 2020. Mungkin masih ada lagi butir-butir rekomendasi lain yang perlu dibuat oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memerjuangkan keuangan berkelanjutan. Namun, empat yang diajukan C20 itu pastilah di antara yang terpenting dan memang harus diperjuangkan bersama. Moment of truth-nya akan kita lihat di Hamburg tanggal 7-8 Juli mendatang, di mana seluruh pimpinan negara G20 akan hadir.

Jalal  
Sustainability Specialist TuK INDONESIA

# Masyarakat Sipil Mengawal Pertemuan G20 Keuangan Berkelanjutan untuk Kemaslahatan Masyarakat dan Lingkungan (2)

Oleh: Jalal

## Sektor Keuangan di Mata C20

Salah satu pelesetan yang paling saya sukai adalah nama C20, yang bisa membuat orang yang biasa membaca tentang G20 kecele. Ia merupakan kependekan Civil-20, yang maksudnya adalah kumpulan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari negara-negara G20. Jadi, ini jelas pelesetan yang ekstra-cerdas. Namun, kecerdasannya bukan cuma di soal nama. Saya melihat organisasi ini memiliki pemikiran mendalam dalam mengawal agenda-agenda G20, tentu dari sudut pandang kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Tanggal 15 Maret 2017 lalu mereka mengeluarkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk G20. Yang langsung membetot perhatian saya adalah yang mereka beri judul Reform the International Financial System. Mengapa? Karena rekomendasi kebijakan ini benar-benar menjawab kekhawatiran banyak pihak setelah pertemuan menteri-menteri keuangan G20 yang lalu dipandang gagal. Tentu, kita masih ingat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya Arab Saudi adalah biang kerok dari kegagalan itu. Tapi, apa yang terjadi itu langsung dibalas dengan saran-saran yang kuat. Saran-saran ini sendiri akan diformalkan pada pertemuan puncak C20 yang akan saya ikuti tanggal 18-19 Juni mendatang, untuk kemudian disampaikan pada pertemuan G20.

Paragraf pembuka rekomendasi kebijakan itu sungguh menohok. "The global financial system is neither resilient nor sustainable. Significant risks and regulatory gaps remain so that citizens are vulnerable to new financial crises, abusive practices such as tax dodging, and new technological challenges. The financial sector must serve the needs of the people and the planet but the G20 still promotes a financial system and monetary policies that create financial instability, social and environmental havoc, inequality, excessive debt and climate change." Saya sudah lama tidak membaca gugatan sekuat itu.

Sangatlah benar bahwa walaupun banyak pemerintah telah mengupayakan perubahan dalam sistem keuangan, namun hasilnya belumlah memuaskan. Kerentanan dan ketidakberlanjutan masih menjadi ciri-ciri dari sistem keuangan di dunia ini. Ambil contoh Amerika Serikat sendiri, yang merupakan negara asal berbagai krisis keuangan global. Alih-alih sistem

keuangannya membaik dengan melindungi masyarakat (main street), setelah krisis pemerintahnya malahan lebih membuat para elit keuangan (Wall Street) menjadi lebih perkasa.

Sektor keuangan seharusnya menopang hidup masyarakat dan Bumi, agar keberlanjutan bisa dipastikan. Namun yang terjadi adalah pemerintahan negara-negara G20 memromosikan sistem dan kebijakan yang membuat kondisi keuangan semakin tidak stabil, kerusakan sosial dan lingkungan, ketimpangan dan hutang yang terus memburuk, juga iklim yang terus berubah. Kalau mengambil Amerika Serikat sebagai contoh lagi, jelas sekali pemerintahnya juga sedang membuat tindakan-tindakan yang merugikan pengendalian perubahan iklim, termasuk dengan mengabaikan perlunya pengarahannya sektor keuangan untuk keperluan tersebut. Jadi, peringatan C20 sangatlah tepat.

Rekomendasi kebijakan keuangan yang dikeluarkan C20 sendiri terdiri dari empat bagian, yaitu regulasi dan arsitektur keuangan; hutang; keuangan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan; serta pajak, anti-pencucian uang, dan korupsi. Yang akan saya bahas lebih lanjut adalah rekomendasi ketiga, yaitu keuangan berkelanjutan.

## Empat Rekomendasi Keuangan Berkelanjutan

Bagian awal rekomendasi tentang keuangan berkelanjutan menyatakan bahwa "The health and productive capacity of people and planet are essential for a sustainable economy. Action and regulations must align financial systems with the 2030 Agenda in order to strengthen these, deliver the SDGs and the climate commitments, and add at least US\$12trn a year to global GDP."

Pemahaman yang jelas hendak disampaikan di situ adalah bahwa masyarakat dan lingkungan yang sehat dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi produktif tidaklah bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana nasib umat manusia serta Bumi—apakah akan bisa berkelanjutan atau mengalami kehancuran—memang digantungkan pada dua kondisi itu. Karena masyarakat global telah menyepakati bahwa agenda keberlanjutan adalah sebagaimana yang telah diformulasikan ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs), maka

sistem keuangan memang harus diarahkan ke sana. Sistem keuangan yang benar adalah yang membuat tercapainya SDGs dan komitmen pengelolaan perubahan iklim, sebagaimana yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Paris.

Rekomendasi pertamanya adalah “Make sustainable finance a core focus of the G20 finance track, including by upgrading the study group on green finance (GFSG) to a permanent working group, and drawing on the full range of experience by civil society worldwide.” Jelas, ini adalah rekomendasi yang maha-penting. Mengapa? Karena keuangan berkelanjutan adalah satu-satunya bentuk keuangan yang masuk akal untuk dilaksanakan. Entah sudah berapa kali dunia dijebloskan ke dalam krisis keuangan yang korban utamanya adalah masyarakat kebanyakan. Entah berapa ribu atau bahkan juta orang yang disengsarakan lantaran investasi yang tak memedulikan perlindungan sosial. Entah sudah berapa luas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang buta terhadap dampak lingkungan. Kita tak bisa lagi membiarkan hal ini terjadi.

Masa depan yang kita inginkan, atau *The Future We Want*, wujudnya akan sangat tergantung dari bagaimana keuangan diarahkan, yaitu apakah akan menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang, atau yang sebaliknya. UNEP Inquiry telah mengingatkan kita semua bahwa ada sistem keuangan yang kita inginkan, atau *The Financial System We Need*, yang tak bisa lagi ditunda-tunda lagi pelaksanaannya. Kita membutuhkan sistem keuangan berkelanjutan, dan kita membutuhkannya sekarang juga. Dan, konsekuensinya, G20 memang perlu untuk memastikan bahwa keuangan berkelanjutan itu yang menjadi fokus.

Untuk mencapai tujuan itu pula, sebuah study group dipandang tak lagi memadai untuk mengeksekusi tugas yang penting itu. Pergeserannya menjadi sebuah permanent working group adalah sebuah keniscayaan. Tentu saja, perubahan status itu perlu diikuti dengan program kerja yang lebih kokoh dan didukung oleh seluruh negara anggota G20 dan perwakilannya.

“Require mandatory disclosure on sustainability risks and opportunities for both private and public actors” adalah rekomendasi kedua. Rekomendasi ini langsung mengingatkan saya kepada sebuah studi yang dilakukan dua profesor dari Universitas Harvard, Ioannis Ioannou dan George Serafeim. Studi yang mereka beri judul *The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting (2012)* membuka mata banyak pihak tentang betapa bermanfaatnya kewajiban laporan keberlanjutan untuk perusahaan.

Mereka meneliti ribuan perusahaan yang ada di 58 negara, dan menemukan bahwa begitu kewajiban laporan keberlanjutan diberlakukan, maka reaksi pertama dari perusahaan adalah memberikan pelatihan yang memadai tentang keberlanjutan, bukan hanya soal laporannya saja. Kesadaran soal tata kelola, kredibilitas manajemen, dan implementasi

etika bisnis meningkat; sementara tingkat korupsi dan suap langsung menurun. Hasilnya bukan saja terlihat di level perusahaan, melainkan juga di level negara yang mewajibkannya, yaitu menguatnya daya saing berkelanjutan alias *sustainable competitiveness*.

Jadi, ketika laporan keberlanjutan diwajibkan, keuntungannya bukan saja ada pada level perusahaan yang menjalankannya, melainkan juga pada level negara. Yang sangat menarik, G20 menyerukan agar negara juga melakukan hal yang sama terhadap lembaga-lembaganya. Saya bisa membayangkan kalau agregat pelaporan itu akan mencerminkan kondisi keberlanjutan setiap negara G20. Dengan menekankan juga pada peluang keberlanjutan, maka setiap negara tidak akan berpikir bahwa hal ini hanyalah beban, melainkan memang merupakan peluang untuk memajukan negaranya.

Rekomendasi ketiga, “Ensure compatibility with the 2030 Agenda and the Paris Agreement by developing regulation and accountability measures for financing and investments” juga sangat penting. Dunia telah bersepakat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2030, di mana terdapat 17 Tujuan yang hendak dicapai. Walaupun SDG13 terkait perubahan iklim, Kesepakatan Paris lebih mendetailkan Tujuan tersebut dengan target kenaikan suhu maksimum 2 derajat Celsius di tahun 2100, dengan sedapat mungkin mengupayakan menjadi 1,5 derajat saja. Keduanya sangat penting untuk keselamatan umat manusia.

Dengan memastikan kompatibilitas, keuangan berkelanjutan juga menjadi lebih jelas tujuannya: menyediakan sumberdaya finansial yang memadai untuk mencapai tujuan SDGs dan Kesepakatan Paris. Tentu, perhitungan perlu dilakukan dengan detail untuk masing-masing tujuan itu, juga untuk mencapai keseluruhannya, lantaran tujuan-tujuan itu sesungguhnya saling mengait. Kemudian—sangat penting untuk disadari—bahwa kemampuan negara-negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidaklah sama, sehingga logika negara yang lebih kaya membantu yang berkembang perlu untuk dipegang.

Masalah terbesar datang dari Amerika Serikat yang presiden barunya memiliki semangat *inward looking* yang sangat kuat. Pada pertemuan Menteri Keuangan G20 di Berlin, Januari 2017, delegasi AS membuat ulah dengan menggagalkan masuknya kalimat-kalimat tentang pembiayaan hijau. Ulah mereka yang diikuti oleh Arab Saudi kemudian membuat banyak pihak marah. Sebagai negara penghasil emisi nomor 2 terbesar di dunia, setelah Tiongkok, yang membuang hampir 18% polusi gas rumah kaca ke atmosfer, tindakan itu benar-benar tak pantas. Maka, *damage control*-nya perlu dilakukan pada pertemuan G20 berikutnya yang diikuti oleh kepala-kepala negara. Ini sangat penting untuk mengembalikan SDGs dan Kesepakatan Paris pada jalur pencapaiannya.

Rekomendasi keempat dan terakhir adalah “Price

in environmental externalities by committing, each country in its own way, to a strong effective carbon price by 2020.” Rekomendasi tersebut terkait erat dengan tujuan penanganan perubahan iklim di SDG13 dan Kesepakatan Paris. Sudah saatnya polusi gas rumah kaca tidak dibiarkan merajalela seperti sekarang. Pembiaran ini membuat energi dan proses produksi bersih tidak kompetitif lantaran ada biaya lingkungan (dan sosial) yang disembunyikan oleh yang kotor.

Untuk itu, sangat perlu bagi dunia untuk menyepakati berapa harga yang harus dikenakan kepada karbon—dan gas rumah kaca lainnya yang disetarakan karbon—dan kapan waktunya. Secara ideal, emisi seharusnya sudah memuncak di tahun 2020 agar kemungkinan manusia selamat menjadi semakin besar. Kalau terjadi setelahnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkannya pada periode berikutnya. Salah satu cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapainya adalah memastikan harga karbon berlaku kepada sebagian karbon yang dihasilkan, lalu harga itu secara bertahap dinaikkan dan keberlakuannya ditingkatkan hingga seluruh karbon membayar pajak dosa tersebut.

Tuntutan ini sangat masuk akal bagi mereka yang melihat keberlanjutan sebagai cita-cita yang penting. Namun, masih banyak pihak yang menentang pemberlakuan pajak karbon lantaran khawatir akan memengaruhi ekonomi mereka dalam jangka pendek. Yang penting diingat adalah bahwa umat manusia tak bisa membiarkan keuntungan jangka pendek bagi segelintir pihak mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk seluruh manusia. Karenanya, tuntutan ini haruslah benar-benar ditegaskan.

## Bagaimana dengan Indonesia?

Membedah satu per satu rekomendasi itu membuat saya berpikir satu hal: bagaimana dengan Indonesia? Rekomendasi pertama jelas mengingatkan saya pada kenyataan bahwa keuangan berkelanjutan di Indonesia masihlah berada di pinggiran. Bahkan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang dibuat oleh OJK saja masih berpikir mengenai bagaimana membuat keuangan berkelanjutan sebagai portofolio belaka, yang jumlah totalnya diharapkan mencapai Rp350 triliun per tahun antara 2015 hingga tahun 2019. Ini mencemaskan lantaran dua hal. Pertama karena hingga sekarang itu pun belum terlaksana. Kedua, jumlah itu jauh sekali dari memadai, karena itu berarti membiarkan sebagian sangat besar uang yang beredar di Indonesia adalah uang yang bekerja bukan untuk keberlanjutan.

Kalau rekomendasi pertama C20 itu—bagian perubahan dari study group menjadi permanent working group—bila diturunkan di tingkat nasional, mungkin hasilnya adalah diperlukannya kelompok studi keuangan berkelanjutan di Indonesia, terutama untuk masyarakat sipil. Mungkin juga diperlukan kelompok studi tersebut untuk pemangku kepentingan yang beragam. Ini penting bagi perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia yang rasanya masih jauh

dari memadai. Namun, pada waktu yang bersamaan Indonesia memerlukan kelompok kerja lintas-pemangku kepentingan yang bertemu secara reguler dan bekerjasama untuk meningkatkan keberlakuan keuangan berkelanjutan di sini. Prototipenya sudah ada di forum yang dibentuk OJK, namun sangat perlu digairahkan lagi, dengan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Soal kewajiban pelaporan keberlanjutan juga perlu diwujudkan. Indonesia memiliki regulasi yang mewajibkan seluruh perusahaan yang telah go public untuk melaporkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang terpisah. Namun, ini perlu diperbaiki dengan kewajiban untuk seluruh perusahaan, bukan hanya perusahaan terbuka. Juga, perlu penegakkan yang serius atas kewajiban itu. Dalam draft Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, kewajiban tersebut juga dinyatakan untuk lembaga jasa keuangan. Hanya saja, belum cukup jelas detailnya. Kalau C20 menuntut untuk juga mencantumkan tantangan dan peluang keberlanjutan, hal itu belumlah dimasukkan oleh OJK.

Kesesuaian antara keuangan berkelanjutan dengan SDGs dan Kesepakatan Paris seharusnya merupakan hal yang otomatis berlaku. Sayangnya, hingga sekarang—walaupun Indonesia sudah meratifikasi keduanya—belum juga ada pernyataan yang jelas itu. Lebih jauh lagi, kejelasan tentang bagaimana SDGs bakal dicapai dan bagaimana Nationally Determined Contributions (NDC) bakal dijabarkan untuk setiap sektor belumlah ada. Padahal, pembagian sektoral dan kerjasama antar-sektor itu yang akan bisa menunjukkan bagaimana keuangan bisa berperan di dalamnya. Termasuk, sektor mana yang perlu mendapat dukungan pendanaan ekstra, dan mana yang perlu secara perlahan maupun secepatnya ditinggalkan.

Terakhir, saya terus terang agak pesimistik dengan kemungkinan pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dalam waktu sedekat 2020. Tetapi yang jelas yang pertama-tama perlu dilakukan adalah membicarakan ini dengan para pemangku kepentingan seluas mungkin. Pengetahuan tentang apa manfaatnya, sektor-sektor mana yang bakal terkena beban versus yang mendapatkan peluang, skenario ekonomi rendah-karbon yang mungkin muncul, dan bagaimana secara teknis ini dilakukan perlu untuk dibicarakan. Mungkin beberapa pilot project bisa dibuat sebelum atau pada tahun 2020, untuk membuktikan bahwa ekonomi rendah-karbon di Indonesia adalah mungkin, dan memang menguntungkan.

Kalau saja draft Peraturan OJK tentang Keuangan Berkelanjutan bisa diperbaiki sesuai dengan dokumen *The Financial System We Need*, implementasi SDGs dan Kesepakatan Paris di Indonesia, serta rekomendasi C20 di atas; lalu RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bisa disetujui tanpa mengurangi sifat progresifnya, sesungguhnya Indonesia akan berada dalam jalur keuangan berkelanjutan yang benar. Semoga.

# Masyarakat Sipil Mengawal Pertemuan G20 Menuntut Transparansi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan

Oleh: Jalal

## Keniscayaan Kewajiban Pelaporan ESG

Perusahaan sudah lama mengklaim dirinya bersedia untuk bekerjasama dengan aktor pembangunan lainnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ada cukup banyak perusahaan progresif yang memang tampak serius mewujudkan hal tersebut, namun tak sedikit yang sesungguhnya hanya menyatakan untuk sekedar lip service. Lebih buruk lagi, ada juga perusahaan yang menyatakannya untuk kepentingan greenwashing. Yang terakhir ini akan melakukan tindakan-tindakan kecil yang tak berarti, tak sesuai dengan dampaknya, tetapi akan mengkomunikasikan habis-habisan.

Pertanyaanya kemudian adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan tertentu memang benar-benar melakukan seluruh tindakan yang seharusnya dan sepantasnya mereka lakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan—atau dalam konteks sekarang lebih tepat dituliskan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)—ataukah sebaliknya?

Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting karena kita seharusnya menghindari gebyah uyah atas perusahaan. Mereka yang memang punya rekam jejak keberlanjutan yang solid seharusnya bisa kita hargai dan jadikan teladan. Perusahaan yang serius memperbaiki dirinya perlu ditolong untuk mencapai tujuan perbaikannya. Sementara, mereka yang sekadar menunggangi istilah pembangunan berkelanjutan untuk kepentingannya sendiri yang sempit dan bertentangan dengan keberlanjutan harus juga kita identifikasi dan permalukan (naming and shaming), bahkan perlu disingkirkan agar tak menghalangi trajektori umat manusia ke arah dunia yang kita inginkan. (Saya kerap melabel perusahaan-perusahaan itu sebagai perusahaan hebat, perusahaan tobat, dan perusahaan jahat, dan dalam beberapa kesempatan telah juga menuliskan karakteristik masing-masing.)

Jawaban masyarakat sipil untuk pertanyaan tersebut salah satunya adalah transparansi dalam aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, and governance, ESG). Dan, karena periode belajar untuk pelaporan itu telah lebih dari satu setengah dekade, sudah saatnya pelaporan ESG menjadi sebuah kewajiban. Begitulah yang dipercaya oleh kelompok

masyarakat sipil global yang tergabung dalam Civil20 atau C20, yang mengadakan pertemuan puncaknya di Hamburg, Jerman, pada 18-19 Juni 2017. Saya sepenuhnya mengamini pendirian ini. Sudah terlampau lama kita membiarkan perusahaan—terutama yang berukuran raksasa—tidak melaporkan apapun, atau melaporkan semaunya dalam bingkai inisiatif voluntari. Kiranya ini sudah tak pantas dan tak memadai lagi.

Pertemuan tersebut adalah untuk merumuskan apa yang masyarakat sipil dapat rekomendasikan kepada para kepala negara yang akan berkumpul di Hamburg pada minggu kedua Juli 2017. Dan, menyangkut transparansi ESG itu yang dituntut adalah “Ensure transparency through mandatory Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure by private sector actors.” Tuntutan tersebut merupakan salah satu yang disampaikan di bawah judul besar Investasi yang Bertanggung Jawab dan Peran Sektor Swasta. Kalau selama ini transparansi dan akuntabilitas kerap dibaca dalam satu tarikan nafas, hal itu karena tanpa transparansi, akuntabilitas mustahil bisa ditegakkan. Transparansi bisa aktif atau sukarela, namun bisa pula diwajibkan. Dan, demi penegakan akuntabilitas yang benar, maka jalan kewajiban transparansi inilah yang dipilih.

Tuntutan tersebut diikuti penjelasan yang bernas sebagai berikut: “Disclosure standards that address the social and environmental impact of the private sector are intrinsic to responsible investment. The G20 can play a significant role in initiating better international monitoring and tracking of private sector actions against the SDGs and the Paris Agreement.” Dari situ kita bisa mengetahui bahwa selain bahwa urusan investasi yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya, tuntutan ini juga terkait dengan bagaimana sektor swasta benar-benar bisa diketahui kontribusinya atas SDGs dan juga Kesepakatan Paris.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Scheyvens, Banks, dan Hughes dalam *The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Business as Usual* (akan terbit di jurnal *Sustainable Development*), sektor swasta sudah banyak ikut memberikan masukan kepada formulasi SDGs di satu sisi, namun kontribusi nyatanya melalui perilaku dalam berbisnis kerap setengah hati atau bahkan berpotensi menggagalkan apa yang telah diformulasikan itu. Dalam soal Kesepakatan Paris, idem

ditto. Kita memang menyaksikan banyak perusahaan progresif—misalnya yang ikut dalam gerakan We're Still In, melawan keputusan Presiden Trump yang secara sepihak keluar dari Kesepakatan Paris—yang telah punya komitmen kuat dalam menangani perubahan iklim. Tapi, itu bukanlah gambaran mayoritas perusahaan.

## Tiga Rekomendasi

Lantaran menghadapi ragam sikap perusahaan itu, C20 merumuskan tiga rekomendasinya. Yang pertama, “Require mandatory ESG disclosures on impact on human rights (including digital rights such as privacy and freedom of expression), human capital, social and employment aspects, corruption, bribery, and environmental and climate matters by all companies with +500 employees, and require companies listed on G20 stock markets to incorporate non-financial ESG information into their mainstream financial reports.”

Di sini C20 menegaskan rekomendasi dalam topik apa saja pelaporan tersebut harus dilakukan dan kepada siapa itu diberlakukan. Saya sangat setuju dengan topik-topik pelaporan yang disebutkan, karena aspek-aspek itu sesungguhnya memang material untuk seluruh perusahaan. Tentu, itu bisa dibuktikan bila uji materialitas memang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang menguasai isu-isu tersebut. Kerap perusahaan membuat pernyataan bahwa isu-isu tertentu tidaklah material karena mereka sesungguhnya tidak melakukan uji materialitas dengan benar, atau bahkan tidak melakukannya sama sekali.

Bagian berikutnya dari rekomendasi itu menyatakan bahwa perusahaan yang punya lebih dari 500 pekerja seharusnya menjadi subjek pelaporan. Sementara, perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa saham sudah seharusnya memasukkan informasi ESG itu ke dalam laporan tahunan yang mereka produksi. Tentu, ini membutuhkan regulasi di tingkat nasional masing-masing negara G20. Berefleksi ke Indonesia sendiri, regulasi kita belum mewajibkan pelaporan ESG untuk perusahaan dengan pekerja di atas 500, walau sudah diwajibkan bagi perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Tetapi, melihat bagaimana kebanyakan perusahaan menampilkan informasinya di dalam laporan tahunan, jelas ada masalah penegakan yang harus diselesaikan.

Rekomendasi kedua adalah “Ensure that ESG information is comparable, consistent, and of high-quality to allow it to be assessed and measured. Referencing adequate reporting frameworks such as CDP/CDSB for natural capital disclosure and the GRI G4 Sustainability, Common Good Report, or UNGP Reporting Framework for human rights/social responsibility reporting can facilitate comparable and consistent disclosure.”

Saya kira sangat jelas penekanannya pada bagian pertama, yaitu bahwa pelaporan ESG yang diwajibkan itu harus dibuat terbandingkan, konsisten, dan bermutu tinggi, sehingga bisa dinilai (kebenarannya) dan diukur (kinerjanya). Bagian selanjutnya memberikan ide bahwa sebetulnya sudah ada beberapa kerangka pelaporan yang selama ini bersifat voluntari yang bisa membantu pemerintah negara-negara G20 untuk menegakkan pelaporan yang bersifat demikian. Beberapa kerangka memiliki popularitas di negara-negara maju, seperti CDP/CDSB itu. Namun, yang kini sudah dianggap sebagai standar pelaporan de facto adalah yang diproduksi oleh GRI. Di standar GRI, prinsip-prinsip pelaporannya bahkan lebih komprehensif lagi, sehingga bila dijadikan regulasi maka akan menjadi sangat kokoh.

Hanya saja, sebetulnya GRI sekarang sudah memperkenalkan generasi terbaru standar pelaporannya, yaitu GRI SRS (Sustainability Reporting Standards) yang akan sepenuhnya menggantikan G4 mulai tahun depan. Sehingga, akan lebih baik bila pemerintah negara-negara G20 menggunakan GRI SRS sebagai dasar bagi regulasinya, bukan GRI G4 yang sebentar lagi berakhir masanya. Indonesia sendiri tertinggal lebih jauh lagi. Peraturan Bapepam LK tentang laporan tahunan yang terbit beberapa tahun lalu masih merujuk pada GRI G3, yang kemudian digantikan oleh GRI G3.1, lalu G4. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia melihat GRI SRS untuk memperbarui regulasinya, agar bisa sesuai dengan perkembangan paling mutakhir. Selain, tentu saja, menegakkannya dengan serius.

Terakhir, rekomendasi C20 adalah “Implement the recommendations of the Financial Stability Board Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (FSB TCFD) into national legislation and facilitate standardized climate risk reporting amongst G20 member countries.” Menurut saya, tak ada jalan lain kalau memang kita serius hendak menangani perubahan iklim, maka perusahaan-perusahaan memang harus dipaksa untuk melaporkan risiko perubahan iklim yang terkait dengan bisnisnya, baik dari sudut pandang perusahaan sebagai entitas terdampak maupun sebagai entitas yang membawa dampak perubahan iklim.

Yang penting diingat di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan risiko itu bukanlah semata-mata ancaman, melainkan juga peluang. Risiko, dalam enterprise risk management yang modern, memang berarti ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu melekat pada ancaman maupun peluang. Jadi, tak seharusnya perusahaan berpikir bahwa pengelolaan perubahan iklim dan pelaporannya sepenuhnya bersifat beban yang tempatnya ada pada cost center. Pengelolaan perubahan iklim, sebagaimana yang telah banyak ditunjukkan pada pakar, memiliki sejumlah besar peluang penghematan, inovasi produk, ceruk pasar baru, arus penerimaan, yang berujung pada peningkatan keuntungan perusahaan.

Secara umum, memang begitulah sifat dari pengelolaan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada posisi progresif sejak awal telah menikmati first-mover advantage. Dan, banyak di antara perusahaan itu yang memulainya karena mereka melihat bahwa beragam aspek keberlanjutan yang mereka laporkan secara sukarela maupun wajib ternyata menyimpan peluang yang besar. Studi bertajuk *The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting* oleh Ioannou dan Serafeim (2012) di seluruh negara yang memiliki regulasi pelaporan keberlanjutan membuktikan hal tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya apa yang dituntut oleh C20 itu adalah demi kebaikan perusahaan dan negara sendiri. Mereka yang (akan) melawannya, menurut hemat saya, hanyalah mereka yang tak mengetahui kenyataan dan basis ilmu pengetahuan dari rekomendasi kewajiban itu. Atau, merupakan perusahaan jahat yang tak ingin kinerja buruknya terbongkar.

Jalal

Sustainability Specialist TuK INDONESIA

## Perlu Kerja Ekstra-Keras! Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman

Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia telah hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 (C20) di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017. Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi masyarakat di seluruh dunia kepada negara-negara anggota G20. Perwakilan Indonesia telah turut serta—bersama-sama dengan perwakilan lebih dari 300 organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia—dalam merumuskan [Komunike C20](#).

Dalam komunike tersebut, jelas dapat dilihat butir-butir pemikiran utama masyarakat sipil yang telah disampaikan kepada Presiden G20, Angela Merkel, Kanselir Jerman. Secara umum, masyarakat sipil melihat bahwa sistem ekonomi neoliberal yang saat ini mewarnai dunia adalah ancaman terhadap keberlanjutan. Bila umat manusia serius untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta menjalankan Kesepakatan Paris untuk melindungi generasi mendatang dari bencana perubahan iklim, perubahan mendasar atas sistem ekonomi haruslah dilakukan. Dan ini membutuhkan kerja ekstra-keras dari seluruh negara G20, termasuk dan terutama Indonesia.

Menindaklanjuti Komunike tersebut, berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia kemudian melakukan diskusi lanjutan untuk merumuskan sikap secara spesifik dari kepada Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara G20 lainnya. Sikap spesifik tersebut terkait dengan fokus kerja masing-masing organisasi, dikaitkan dengan agenda G20.

### Transparansi, Investasi dan Perdagangan, serta Migrasi

TuK INDONESIA secara spesifik menyoroti tiga hal, yang

seluruhnya terkait dengan bagaimana perusahaan harus diatur. Sangat jelas bahwa perusahaan-perusahaan di dunia ini masih cenderung menutupi berbagai dampak negatif dari operasinya terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, bersepakat dengan rekomendasi C20, TuK INDONESIA menuntut agar Pemerintah Indonesia bisa melakukan kewajiban pelaporan keberlanjutan dengan segera. Perusahaan-perusahaan besar serta yang melantai di Bursa Efek Indonesia sudah seharusnya diwajibkan melaporkan kebijakan, program dan kinerja keberlanjutannya dengan komprehensif.

Pewajiban pelaporan itu, dengan pengawasan yang ketat atas kebenaran isinya, juga kejelasan tentang apa yang menjadi kewajiban ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan akan bisa mengubah praktik dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan seluruh dunia. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membuat regulasi yang tegas, serta menciptakan sistem (dis)insentif yang komprehensif. Perbedaan antara perusahaan yang bertanggung jawab sosial dengan yang tidak sangatlah perlu dilakukan, sehingga pemangku kepentingan lainnya juga bisa memberikan sikap yang tepat kepada perusahaan-perusahaan itu.

Salah satu pemangku kepentingan yang paling perlu untuk diubah perilakunya adalah lembaga-lembaga jasa keuangan. “Kalau kita sungguh-sungguh menginginkan perusahaan beroperasi secara berkelanjutan, maka harus dipastikan bahwa hanya mereka yang serius dalam mencapai tujuan keberlanjutan saja yang bisa mendapatkan akses pendanaan.” Demikian pernyataan Jalal, penasihat kebijakan keuangan berkelanjutan TuK INDONESIA. Lebih lanjut lagi, dia menyatakan “Sudah saatnya pendanaan publik maupun swasta ditimbang dengan

ukuran yang tegas. Yang membantu mencapai tujuan SDGs dan Kesepakatan Paris, itulah yang dibiayai. Yang bertentangan dengan keduanya, segera perlu untuk dimasukkan ke dalam daftar negatif dan tidak dibiayai. Hanya dengan demikian saja Indonesia dan dunia bisa benar-benar bisa melihat masa depan yang lebih baik.”

Isu perdagangan dan investasi akan menjadi salah satu pembahasan yang juga penting dalam agenda G20. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai agenda G20 dalam memerangi proteksionisme melalui reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Indonesia, karena hal ini bisa menjadi pukulan balik bagi Indonesia.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, berpendapat dorongan G20 untuk pendisiplinan terhadap regulasi domestik atas kebijakan perdagangan dan investasi internasional termasuk penegakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, akan semakin mempersempit ruang kebijakan pemerintah Indonesia. “Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasional. Perlu diingat, Pemerintah Indonesia sudah diprotes dan digugat banyak negara akibat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat untuk memperkuat industri hilir, persyaratan kandungan lokal, dan pembatasan impor di sektor tertentu,” terang Rachmi.

Wahyu Susilo, direktur eksekutif Migrant Care, menyoroti kondisi dunia yang berubah dalam kurun waktu yang sangat cepat. “Kecenderungan politik anti-migrasi yang mengemuka di Amerika setelah terpilihnya Donald Trump dan penguatan populisme kanan di negara-negara anggota G20 adalah ancaman bagi kebebasan bermobilitas pekerja dari negara-negara berkembang dan juga mempersempit ruang aman bagi para pengungsi yang terusir di negara asalnya.” Oleh karena itu, Migrant Care berharap bahwa butir terakhir dari Komunike C20 bisa ditambahkan dengan pernyataan “...tidak diskriminatif, dan memastikan mobilitas pekerja antar-negara dilindungi dalam skema hak asasi manusia.”

## Sumberdaya Alam, Perubahan Iklim dan Energi

Bersetuju dengan kesimpulan C20, WALHI menilai bahwa selama negara-negara anggota G20 tidak mengoreksi sistem ekonomi neoliberal yang menjadi paradigma ekonomi mereka, maka G20 tidak akan pernah berhasil mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rezim pertumbuhan ekonomi global, yang juga dianut oleh pemerintah Indonesia, justru semakin melanggengkan ketimpangan penguasaan sumberdaya alam, termasuk sumber-sumber agraria. Penguasaan oleh segelintir korporasi atas sumberdaya tersebut hampir selalu berujung pada konflik.

“Ketimpangan ekonomi semakin nyata dan krisis global terus terjadi—seperti krisis iklim dan krisis pangan—akibat monopoli atau penguasaan korporasi dalam sistem pangan global dan sistem produksi pertanian dunia. Karena mengacu pada perjanjian perdagangan internasional yang memihak pada kepentingan korporasi dan membatasi peran negara, maka ketidakadilan dan krisis adalah keniscayaan.” Demikian ungkap Khalisah Khalid, juru bicara WALHI.

Terkait dengan perubahan iklim, negara-negara G20 mempunyai peran penting memimpin dunia menuju pembangunan rendah karbon. G20 yang menghasilkan 85% GDP global, bertanggung jawab terhadap 75% emisi global. Berdasarkan Brown to Green Report 2017 yang diluncurkan oleh Climate Transparency pada awal pekan ini, negara-negara G20 telah memulai transisi menuju ekonomi rendah karbon, namun dinilai masih sangat lambat untuk mencegah terjadinya kenaikan di bawah 2 derajat C sesuai target Kesepakatan Paris.

Indonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 yang dinyatakan dalam NDC, namun, sayangnya, belum sejalan dengan target Kesepakatan Paris. Kebijakan iklim Indonesia di tingkat sektoral dinilai belum cukup baik, dan minim strategi penurunan emisi jangka panjang. Walaupun dinilai cukup berhasil dalam upaya pengurangan subsidi bahan bakar fosil, namun di sisi lain dukungan instrumen-instrumen pendanaan publik atas energi terbarukan tidak bertambah. Daya tarik investasi untuk energi terbarukan Indonesia juga sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Fabby Tumiwa, direktur eksekutif IESR, menyatakan “Kami meminta Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di Hamburg untuk memperkuat komitmen Indonesia atas Kesepakatan Paris dan mendorong pengurangan emisi GRK di sektor kehutanan, lahan gambut dan energi yang lebih ambisius sebelum 2020.”

## Pajak dan Industri Ekstraktif

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menilai pertemuan KTT G20 di Jerman penting untuk disikapi secara kritis, karena secara langsung akan berimbas pada kebijakan dalam negeri Indonesia. Terdapat sejumlah butir penting khususnya di sektor pajak dan industri ekstraktif yang harus didorong oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh pemimpin G20.

Lima hal yang menjadi perhatian PWYP Indonesia terutama adalah: Pertama, Indonesia dan negara-negara G20 untuk serius menindak dan mencegah praktik aliran uang ilegal yang berasal dari praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya dengan membentuk mekanisme pengawasan yang tepat. Kedua, Indonesia perlu mendorong adanya transfer pengetahuan dari

negara-negara G20 dalam implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) agar penerapan dapat berjalan secara baik dan efektif. Ketiga, Pemerintah Indonesia dan negara-negara G20 dituntut serius untuk segera mensahkan peraturan soal beneficial ownership dari perusahaan dan entitas legal lainnya yang mengambil keuntungan di Indonesia. Keempat, Indonesia dan negara-negara G20 harus mendesak perusahaan multinasional untuk mengimplementasikan informasi country-by-country reporting secara terpisah namun dapat diakses antarnegara. Terakhir, Indonesia dan negara-negara G20 lainnya penting untuk memastikan perusahaan di sektor ekstraktif untuk mematuhi standar-standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek HAM, lingkungan, tata kelola (transparansi dan akuntabilitas), serta hak-hak pekerja pada sepanjang rantai nilainya.

Sementara, Prakarsa menyatakan dukungannya bagi langkah Presiden Joko Widodo yang akan mendorong agenda perang terhadap penggelapan pajak secara global pada KTT G20. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban dari praktik penghindaran dan pengelakan pajak harus memaksa seluruh kepala negara anggota G20 untuk bersama-sama memerangi penggelapan pajak. Pemerintah Indonesia juga harus mendorong kebijakan pajak progresif dan redistributif secara global melalui G20 dan forum multilateral lainnya. Pajak harus menjadi instrumen bagi peningkatan investasi publik dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus berani memimpin kerjasama global antar-jurisdiksi pajak dan penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

“Pemerintah Indonesia perlu mengkampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global dan orang super-kaya. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kerjasama pemajakan terhadap bisnis digital. Ini penting karena potensi pajak dari sektor bisnis digital sangat besar dan kepatuhan mereka masih sangat rendah.” Demikian pernyataan Ah Maftuchan, direktur eksekutif Prakarsa. Dia kemudian melanjutkan, “Indonesia juga perlu mengajak seluruh negara G20 untuk mendesak pembentukan Intergovernmental UN Tax Body. Selain, perlu juga mendorong realisasi kesepakatan global tentang Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS) agar dilaksanakan secara global pada tahun 2017. Jika mundur, maka akan makin mempersulit langkah-langkah untuk memobilisasi penerimaan negara dari pajak secara akseleratif dan massif.”

## Pilihan bagi Indonesia

Seluruh organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung di dalam ICFP sangat menekankan betapa pentingnya agenda-agenda tersebut untuk segera

dijalankan, agar penerimaan negara dari pajak terus meningkat tajam dan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk menciptakan kesejahteraan sosial, akan makin meningkat pula. Reformasi perpajakan memang dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bahu-membahu mendorong sistem ekonomi-politik yang lebih berkeadilan, menyejahterakan mayoritas masyarakat, dan berkelanjutan. Tidak saja bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi rakyat di belahan lain secara global.

Namun, yang sangat penting diingat adalah bahwa seluruh tugas tersebut sangatlah berat, sehingga membutuhkan disiplin yang sangat tinggi dalam merencanakan dan mengeksekusinya. Indonesia kini masih dipandang sebagai anak bawang di antara negara-negara G20, terutama lantaran ukuran ekonomi yang masih berada di nomor 16. Tetapi, kalau memang Indonesia ingin berdiri tegak di antara negara-negara G20 lainnya—dan mewujudkan ramalan bahwa kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 (menurut McKinsey) atau nomor 6 (menurut PwC) di tahun 2030, dan menjadi nomor 5 di tahun 2050—tak ada pilihan selain bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia yang progresif untuk bekerja keras mewujudkannya, di antaranya dengan menjalankan berbagai masukan di atas. Menjalankan masukan-masukan tersebut sangatlah penting karena menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan sekarang tidaklah otomatis berarti kebaikan bagi masyarakat Indonesia apabila keadilan dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak terwujud.

Pilihan lainnya adalah terus bekerja secara business as usual, menysia-nyikan berbagai peluang yang sekarang sebetulnya dimiliki Indonesia, dan terus menjadi negara yang berada di hampir nomor buncit di antara negara-negara G20, dan terus terancam keberlanjutannya. “Kalau memang tidak bersedia bekerja keras untuk memantaskan diri naik peringkat di G20, mungkin lebih baik menyerah saja sekarang. Keluar dari G20 mungkin lebih terhormat, daripada mempermalukan 250 juta warga Indonesia di hadapan lebih dari 7 miliar penduduk Bumi.” Demikian yang disampaikan Edi Sutrisno, direktur advokasi TuK INDONESIA, menutup diskusi.

Jakarta, 6 Juli 2017

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP) terdiri dari IESR – IGJ – INFID – Migrant Care – Prakarsa – PWYP Indonesia – Transparency International Indonesia – TuK INDONESIA – WALHI.

## Berita Lainnya

### Walhi Minta Bank Green Kredit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi memperingati Hari Lingkungan Hidup dengan mengadakan aksi damai di simpang Bank Indonesia, Telanaipura - Jambi, Senin (5/6).

"Sekaligus kami dari Walhi dan Sahabat Walhi, mengampanyekan perbankan hari ini masih banyak memberikan kredit ke perusahaan pelaku pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Abdul, Manajer Kampanye dan Penguatan Jaringan Walhi Jambi.

Walhi menuntut bank-bank yang memberikan kredit harusnya lebih teliti. "Atau memberikan semacam garansi ketika memberikan modal dan kredit. Atau lebih terbuka memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan dan industri kelapa sawit. Misalnya juga menerapkan seperti green kredit dan semacamnya," ungkapnya.

Pihaknya sudah melakukan tracking ke beberapa bank. Walhi akan mempublikasikan setelah data lengkap.

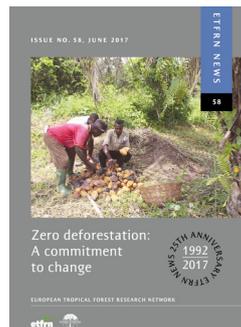
Sumber: [WALHI Jambi](#)

### Pelibatan Penyandang dana, dalam konflik PTPN II dan masyarakat di kabupaten Jayapura (Keerom)

WALHI Papua melakukan unjuk rasa atas berbagai masalah yang disebabkan oleh PTPN II di Kabupaten Keerom. WALHI Papua juga menuntut penyandang dana untuk bertanggung jawab: "bahwa adanya ruang investasi bagi korporasi, selain pemberian izin oleh pemerintah, teridentifikasi pula bantuan pendanaan dari pihak penyandang dana. Hal ini merupakan arah kebijakan pihak penyandang dana yang lebih berorientasi pada nilai profit tanpa memiliki niat partisipasi dalam perlindungan manusia dan lingkungan di Papua secara khusus, dan Indonesia pada umumnya."

Baca artikel selengkapnya [disini](#).

## Publikasi



### Zero deforestation: A commitment to change ETRN 58

Dengan artikel dari TuK, Profundo, RAN dan Fern. [Download](#) (Bahasa Inggris)



### Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

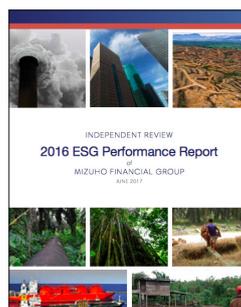
TuK Indonesia 2017

[Download](#)



### Pengalaman Inisiatif Perbankan TuK Indonesia dan Profundo

Baca lebih lanjut [disini](#)



### 2016 ESG Performance Report of Mizuho Financial Group

RAN dan mitra

[Download](#)

## Agenda

- 1). 7 - 8 Juli: [Pertemuan G20 di Hamburg](#), Jerman.
- 2). 18 Juli: [Responsible Investment Forum](#): Jakarta

# Tentang Newsletter

Buletin *Forests and Finance* merupakan publikasi triwulan *TuK INDONESIA* dan *Profundo*. Buletin ini menyediakan berita perkembangan tentang kampanye Hutan & Pembiayaannya di Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk menghentikan semua arus keuangan yang menyebabkan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kami meminta Otoritas Keuangan untuk mengimplementasikan peraturan yang kuat mengenai sosial, lingkungan dan tata kelola yang harus dipenuhi oleh Lembaga Jasa Keuangan. Kami juga bekerja sama dengan LSM dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan kertas dan bubur kertas dengan melibatkan bank-bank yang membiayai aktivitas bisnis mereka. Proyek ini dibiayai oleh *NORAD*.

